INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

## CONFLICT OF INTEREST

# BENTURAN KEPENTINGAN



inspektorat.kaltaraprov.go.id
inspektorat.kaltaraprov
itwilkaltara@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Peran ASN sebagai agen perubahan harus menjadi contoh kepatuhan etika, mendorong edukasi konflik kepentingan di unit kerja, dan berani melapor jika melihat potensi benturan kepentingan.

Kepemimpinan etis dimulai dari kesadaran individu dalam menjaga integritas jabatan.

Menteri PANRB, Rini Widyantini
(3 Juni 2025)



inspektorat.kaltaraprov.go.id
inspektorat.kaltaraprov
itwilkaltara@gmail.com

# DASAR HUKUM

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik;
b. bahwa keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik;
c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi




# DEFINISI KONFLIK KEPENTINGAN

Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibaut dan/atau dilakukannya.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

inspektorat.kaltaraprov.go.id
inspektorat.kaltaraprov
itwilkaltara@gmail.com

# TUJUAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

- Menjaga objektivitas dan profesionalisme ASN.
- Mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Mendukung penerapan Sistem Integritas di instansi pemerintah.

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA ANTIKORUPSI 2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

# SUMBER DAN BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

## Kepentingan Bisnis atau Finansial

Kondisi konflik kepentingan dapat terjadi ketika pejabat dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi bisnis atau finansial yang dimilikinya.





## Hubungan Keluarga dan Kerabat

Kondisi konflik kepentingan ini dapat terjadi ketika seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat

## Rangkap Jabatan & Pekerjaan di luar Pekerjaan Pokok

Kondisi konflik kepentingan terjadi ketika dalam melaksanakan kewenangan publiknya seorang pejabat dihadapkan dengan kepentingan pribadinya di perkerjaan yang lain.





## Pengaturan pengaruh/relasi jabatan lama

Situasi knflik kepentingan ini dapat terjadi ketika mantan pejabat masih memiliki pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di masa mendatang di tempat kerja barunya.

## Hubungan Afiliasi

Konflik kepentingan dapat pula terjadi antara seorang pejabat dengan pihak lain di mana ia memiliki hubungan dekat dengannya.





## Penerimaan Hadiah/Gratifikasi

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah melarang pejabat menerima hadiah/gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya karena dipersamakn dengan menerima suap, kecuali pejabat tersebut melaporkannya.

inspektorat.kaltaraprov.go.id
inspektorat.kaltaraprov
itwilkaltara@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

# PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

**IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN RISIKO KONFLIK KEPETINGAN**

**PEMBUATAN/REVISI PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN BESERTA PETUNJUK TEKNISYA (JIKA DIPERLUKAN)**

**PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KOMITMEN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN, TERMASUK MELALUI PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGRAN, SERTA MELAKUKAN SOSIALISASI KOMITMEN DAN PERATURAN YANG TERKAIT PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN SECARA BERKALA.**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KONFLIK KEPENTINGAN (P3KK)**



inspektorat.kaltaraprov.go.id
inspektorat.kaltaraprov
itwilkaltara@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

# PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN



1

**PENCATATAN**

Pencatatan daftar kepentingan pribadi.

2

**DEKLARASI**

Deklarasi konflik kepentingan.

3

**TL ATAS DEKLARASI**

Pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi.

4

**PENGENDALIAN**

Pengendalian konflik kepentingan melalui masa tunggu mantan pejabat pemerintah.

5

**PELATIHAN**

Pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan.

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

# PENGAWASAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN, SANKSI, DAN APRESIASI

01 PELAKSANAAN PENGAWASAN (TERMASUK MEMASTIKAN ADANYA SISTEM PENGADUAN)



02 PENJATUHAN SANKSI (JIKA ADA PELANGGARAN)



03 PEMBERIAN APRESIASI (BAGI PEJABAT/PEGAWAI) YANG MENJALANKAN ATURAN SECARA OPTIMAL





## MONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASI PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan konflik kepentingan.

## TINDAKAN KOREKSI DAN PERBAIKAN

Melakukan tindakan koreksi dan perbaikian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi



inspektorat.kaltaraprov.go.id inspektorat.kaltaraprov itwilkaltara@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PARIWARA
ANTIKORUPSI
2026

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



# STOP KORUPSI

## INTEGRITAS ADALAH KUNCI PENCEGAHAN KORUPSI.

## LAPORKAN MELALUI :

**WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)**

- 0813 2020 546 (WA)

**GOL KPK**

- https://gol.kpk.go.id/

**DUMAS ITDA KALTARA**

- https://bit.ly/Dumas_Kaltara

SCAN

s.id